

AKIBAT HUKUM PEMBERIAN HIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT YANG TIDAK PROSEDURAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh

RESA WAHYU WIDAYAT JATI
NPM. 0671010018

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
SURABAYA
2012

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

AKIBAT HUKUM PEMBERIAN HIBAH TERHADAP ANAK
ANGKAT YANG TIDAK PROSEDURAL

Disusun oleh :

Resa Wahyu Widayat Jati
0671010018

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Subani, SH., M.Si.
NIP/NPT.19510504 198303 1 001

Mengetahui,
D E K A N

Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM.
NIP/NPT. 19620625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Resa Wahyu Widayat Jati
Tempat/tgl. Lahir : Surabaya/ 12 November 1988
NPM : 0671010018
Kosentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Wonosari Besar No.7, Ujung, Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul : “AKIBAT HUKUM PEMBERIAN HIBAH YANG TIDAK PROSEDURAL dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka, saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,
A.n. KAPROGDI ILMU HUKUM

Surabaya, February 2012
PENULIS

Subani, SH., M.Si.
NIP/NPT.19510504 198303 1 001

Resa Wahyu Widayat Jati
NPM. 0671010018

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahahirabbil’aalamiin, dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, sang pemberi nafas hidup yang telah melimpah rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini, dengan judul “ AKIBAT HUKUM PEMBERIAN HIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT YANG TIDAK PROSEDURAL”

Skripsi penelitian ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai wahana untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Di samping itu juga diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya, demi mengadakan pembaharuan bagi penegakan hukum dimasa yang akan datang.

Skripsi penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1 Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP., Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- 2 Bapak Haryo Sulistiyantoro, SH,MM, selaku Dekan Fakultas Hukum.
- 3 Bapak Sutrisno, SH, M.Hum selaku Wadek I Fakultas Hukum.
- 4 Bapak Drs. H. Warsito SH, MM selaku dosen pembimbing utama yang memiliki empati terhadap penulis dan mengarahkan dalam pembuatan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 5 Bapak Subani SH, Msi., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum serta dosen

pembimbing pendamping tercinta yang sangat membantu sekali dalam penyelesaian penulisan ini.

- 6 Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi penelitian ini.
- 7 Keluarga khususnya kedua orang tua, (Papa dan Mama), adek Reno Wahyu Setia Boma, adek Rega Wahyu Fitho Samudra yang telah memberikan doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 8 Sahabat-sahabat penulis, teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Borri (Ari Handoko), Ricky Herdian, Rey Kristiansyah, Pace (Shafareza Erviansyah Adhinegara), Soimah (Kurnia Puspita Sari Purwanto), Ateng (boimpopon), Dimast Dimust Dimdim, mbak Dian Puspitosari dan Bunda Diah Puspitosari, para anak-anak kantin dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan saran sebagai masukan didalam pembuatan penelitian ini hingga selesai.
- 9 Spesial untuk Hesti Caby (Hesti Oktaviana) yang sangat berarti, yang dengan ikhlas menunggu dan menemani serta memberi motivasi besar buat mengerjakan penelitian ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna. Karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun peneliti harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan penelitian selanjutnya, sehingga skripsi penelitian ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, Februari 2012

Penulis

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Resa Wahyu Widayat Jati

NPM : 0671010018

Tempat Tanggal Lahir: Surabaya, 12 november 1988

Program Studi : Strata 1 (S1)

Judul Skripsi :

AKIBAT HUKUM PEMBERIAN HIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT
YANG TIDAK PROSEDURAL

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum pemberian hibah yang tidak prosedural terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya yang dihibahkan ditinjau dari segi hukum Islam. Dalam kasus ini praktek pemberian hibah yang terjadi sangatlah beragam baik hibah kepada cucu, anak kandung, anak tiri, dan anak angkat. Untuk menyelesaikan permasalahan sengketa para pihak lebih mengutamakan pada musyawarah keluarga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma kaidah dari peraturan perundangan. Sumber data diperoleh dari literature-literatur kompilasi hukum islam. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yang meliputi isi dan struktur hokum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah Menurut hukum islam adalah tidak termasuk orang yang mendapatkan hibah, maka tidak ada hak waris terhadap anak angkat, karena Secara umum anak angkat tidak mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini berdasarkan pada ketentuan kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa anak angkat memperoleh harta peninggalan orang tua angkatnya dengan jalan melalui hibah atau wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.

Kata Kunci : Kompilasi Hukum Islam, Anak Angkat, Hibah

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI | iii |
| ABSTRAKSI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian | 6 |
| a. Kegunaan Teoritis | 6 |
| b. Kegunaan Praktis | 7 |
| 1.5 Kajian Pustaka | 7 |
| a. Pengertian Hibah | 7 |
| b. Rukun Hibah | 13 |
| c. Serah Terima Hibah | 15 |
| d. Hibah Tanpa Imbalan | 16 |
| e. Pemasukan Atas Hibah (inberg) | 17 |
| f. Surat Wasiat..... | 18 |
| g. Perjanjian | 19 |

| | |
|--|---|
| h. Anak | 20 |
| i. Harta Peninggalan | 21 |
| 1.6 Metode Penelitian | 22 |
| a. Pendekatan Masalah | 22 |
| b. Fokus Penelitian | 22 |
| c. Sumber Bahan Hukum | 22 |
| d. Metode Pengumpulan Data | 24 |
| e. Study Kepustakaan | 24 |
| f. Analisis Data | 24 |
| g. Sistematika Penulisan | 25 |
| BAB II | PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH MENURUT HUKUM ISLAM |
| 2.1 Prosedur Pemberian Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam | 29 |
| 2.2 Hibah Terhadap Anak Angkat | 37 |
| 2.3 Unsur-unsur Penyelenggaraan Hibah Menurut Hukum Islam | 40 |
| 2.3.1 Rukun dan Syarat Hibah | 40 |
| 2.3.2 Pengertian Hibah Wasiat | 41 |
| 2.3.3 Barang Yang Diwasiatkan | 42 |
| 2.3.4 Rukun Hibah Wasiat Dalam KHI | 42 |
| BAB III | AKIBAT HUKUM BAGI PENERIMA HIBAH YANG TIDAK PROSEDURAL |
| 3.1 Analisa Dasar Hukum Pembagian Hibah Harta Peninggalan Orang Tua Terhadap Anak Angkatnya | 44 |
| 3.2 Akibat Hukum Bagi Penerima Hibah Yang tidak Prosedural | 48 |

| | | |
|----------------|------------------|----|
| BAB IV | PENUTUP | |
| 4.1 | Kesimpulan | 50 |
| 4.2 | Saran | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 52 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri atau terpisah dari kelompok manusia lainnya. Menurut Aristoteles seorang ahli pikir Yunani yang di sadur dalam buku C.S.T .Kansil menyatakan :

“Bahwa manusia itu adalah Zoon Politicon, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk hidup pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Oleh karena itu sifatnya yang suka bergaul satu dengan yang lain, maka manusia disebut makhluk sosial”.¹

Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia semenjak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu didalam lingkungan masyarakat, karena hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan saja yang mampu mengasingkan diri dari orang-orang lainnya. Dalam bentuknya yang terkecil hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.

¹C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,1989,hal 29

Sudah merupakan kodrat manusia untuk hidup berdampingan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah tempat bagi manusia untuk mengabdikan diri satu dengan yang lain dan saling menghormati perasaan serta merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar masyarakat dan Negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa Peraturan – Peraturan dan Undang – Undang yang mengatur tentang perkawinan terutama Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

disebutkan :

“ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga. Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak sebagai penerus keturunan yang terlahir dari perkawinan yang sah mempunyai kedudukan anak yang sah. Keinginan untuk mempunyai seorang anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kenyataannya tidak jarang sebuah rumah tangga atau keluarga tidak mendapatkan keturunan. Apabila suatu keluarga itu tidak dilahirkan seorang anak maka untuk melengkapi unsur keluarga atau untuk melanjutkan keturunannya dapat dilakukan suatu perbuatan hukum yaitu dengan mengangkat anak.

Biasanya perkawinan yang tidak memiliki keturunan melakukan upaya antara lain mengangkat anak, hal ini sering terjadi pada masyarakat di Indonesia, di karenakan tidak semua keluarga memiliki kesempatan untuk memiliki anak kandung. Banyak hal yang menyebabkan hal ini. Bisa jadi karena alasan medis, karena usia, atau karena memang belum “dipercaya” untuk memiliki anak oleh Tuhan.

Bagi keluarga yang belum dikaruniai anak, mengangkat anak merupakan jalan yang tepat. Banyak keluarga yang mengadopsi anak sebagai “pancingan” agar secepat mungkin dikaruniai anak kandung. Namun ada juga yang mengangkat anak untuk meringankan beban orang tua kandung si anak, terlebih lagi jika orang tua kandung anak tersebut berasal dari keluarga yang tidak mampu.

Dalam Pasal 12 ayat (1) undang-undang no.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak tersebut diatur bahwa pengangkatan anak untuk

kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengertian pengangkatan anak atau adopsi adalah bahwa “ pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.”²

Dalam mengangkat anak yang tidak melalui pengadilan, anak tersebut tidak berhak mewaris, di karenakan prinsip dari pewarisan adalah adanya hubungan darah, maka secara hukum anak angkat atau anak tiri (yang bukan keturunan langsung dari pearis) tidak berhak mendapatkan warisan secara langsung dari pewaris. Namun dimungkinkan bagi anak angkat tersebut untuk menerima warisan dengan cara pemberian Hibah atau “Hibah wasiat” (pasal 874 BW). Pemilik harta masih hidup tidak dapat mewariskan apapun kepada ahli warisnya. Sehingga, dalam hal terjadi suatu pemberian atas suatu barang kepada keturunannya yang ditujukan agar keturunannya dapat memiliki hak atas barang tersebut setelah meninggal dunia (dalam bentuk hibah misalnya) maka hal tersebut dianggap sebagai “Hibah Wasiat”. Dimana barang tersebut baru beralih pada saat pemberi hibah telah meninggal dunia.. Dalam hal pemberian barang

² Arif Gosita. 1989. Masalah Perlindungan Anak-Edisi Pertama. Jakarta : Akademi Pressindo. Hal 44

tersebut diberikan pada saat si pemberi barang masih hidup, tanpa diberikan suatu imbalan berupa uang, maka hal tersebut disebut sebagai “Hibah” saja.

Bagi orang tua angkat agar anak angkatnya mendapat bagian dari harta peninggalannya, maka perlu dilakukan hibah. Yang merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak sebab dan musababnya) anpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi hibah masih hidup (inilah yang membedakan dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan setelah si pewasiat meninggal dunia).

Tidak semua hibah yang dilakukan orang tua angkat melalui prosedural yang di atur dalam Undang-undang, di karenakan kebanyakan dari orang tua angkat meremehkan adanya aturan pemberian hibah. Faktor penyebab umum ialah orang tua angkatnya terlalu berlebihan kasih sayangnya kepada anak angkatnya lalu berwasiat dengan menyerahkan dan mengatasmakan seluruh harta kekayaan kepada anak angkatnya

Untuk itulah penulis membahas tentang masalah diatas yang mana penulis menemukan kegagalan yaitu adanya pemberian hibah yang tidak prosedural.

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yang akan penulis angkat dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pemberian hibah berdasarkan kompilasi hukum Islam?
2. Apa akibat hukum bagi penerima hibah yang tidak prosedural?

1.3 Tujuan Penelitian.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian hibah berdasarkan kompilasi hukum Islam
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana akibat hukum bagi penerima hibah yang tidak prosedural

1.4 Kegunaan Penelitian.

Dalam penulisan ini, kegunaan yang ingin dicapai dibagi menjadi dua yaitu kegunaan akademis atau teoritis dalam sumbangan penelitian pada dunia pendidikan khususnya Perguruan Tinggi dan kegunaan praktis sehubungan dengan sumbangannya bagi kehidupan masyarakat dalam hal pengetahuan di bidang pertanahan khususnya tentang pemberian hibah terhadap anak angkat yang tidak prosedural.

a. Kegunaan Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam rangka pembaharuan ketentuan hukum perdata (KUHPer) di masa yang akan datang, serta memberi pengetahuan bagi para penghibah dalam menghibahkan kepada anak angkatnya.

b. Kegunaan Praktis :

- A. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada penghibah dalam melakukan proses hibahnya sesuai dengan tatacara serta aturan yang ada dalam proses peralihan hak atas tanah tersebut.
- B. Bisa menjadi dasar penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam guna mengupas tema tersebut.
- C. Menambah pengetahuan bagi para mahasiswa di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan khususnya dan di jurusan lain pada umumnya.
- D. Menjadi bahan literatur bagi mahasiswa pada umumnya.

1.5 Kajian Pustaka

A. Pengertian Hibah

Hibah adalah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab dan musababnya) tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima atau pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi hibah masih hidup. Inilah mengapa hibah dapat diberika kepada siapapun sesuai keinginan si pemberi hibah.

Rukun hibah, yaitu : penghibah, penerima hibah, ijab dan kabul, dan benda yang dihibahkan. Penghibah harta yang dilakukan oleh orang sakit hukumnya sama dengan wasiat. Menurut jamhur ulama seorang

dapat/boleh menghibahkan semua apa yang dimilikinya kepada orang lain.³

Berdasarkan Pasal 1666 Kitab Undang – undang Hukum Perdata menyebutkan :

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

Menurut pengertian pasal 1666 B.W. yang dinamakan “pemberian” atau Hibah ialah suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma dengan secara mutlak memberikan suatu benda pada pihak yang lainnya, pihak mana menerima pemberian itu. Sebagai suatu perjanjian, pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat dicabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak. Jadi berlainan sekali sifatnya dari suatu hibah wasiat atau pemberian dalam suatu testament, yang baru memperoleh kekuatan mutlak, apabila orang yang memberikan benda sudah meninggal, dan sebelumnya ia selalu dapat ditarik kembali.

Dalam pasal 211 KHI disebutkan hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Maksud dapat diperhitungkan berarti harta yang dihibahkan dapat dijadikan bagian waris yang bagian waris sendiri dapat lebih kecil karena karena sudah mendapatkan hibah. Dalam fiqih hak anak terhadap orang tuannya dapat diperoleh dari 2 jalan, yaitu

³ Google (Ibn Rusyd dalam Bidayah al-Mujtahid)

hibah atau hibah wasiat dan waris.

Ketentuan hibah disebutkan surat Al-Baqarah ayat 177 :

“ Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

dan surat Al-Maidah ayat 2 :

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Sedangkan hadits adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim. Hibah dan wasiat sendiri pada dasarnya untuk tujuan yang baik, karena pada dasarnya adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan pahala dari Allah SWT. Faktor yang paling dalam disyariatkan hibah dan wasiat ini adalah faktor kemanusiaan, keikhlasan dan ketulusan dari penghibah yang berwasiat. Kalapun akan di bedakannya hanya waktu pelaknasaannya, yaitu hibah dilaksanakan semasa penghibah masih hidup, sedang wasiat dilaksanakan setelah pewasiat wafat. Dikatakan hibah dan wasiat pada asanya adalah pemberian seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan pahala dari Allah SWT karena arti harfiah dari 2 (dua) kata ini mendekati arti yang sama. wasiat artinya menjadikan, menaruh belas kasihan, berpesan menyambung, memerintah, mewajibkan. Sedangkan hibah diartikan pemberian tanpa syarat tanpa mengharapkan pahala dari Allah SWT. Oleh karena itu oleh mazhab Maliki hibah sama dengan hadiah, hibah menurut mazhab Syafi'i adalah pemberian untuk menghormati atau memuliakan seseorang tanpa bermaksud mengharapkan pahala dari Allah SWT. Menurut mazhab Syafi'i hibah mengandung dua pengertian, yaitu pengertian umum dan khusus,

pengertian umum mencakup hadiah dan sedekah dan pengertian khusus yang disebut hibah apabila pemberian tersebut tidak bermaksud menghormati atau memuliakan dan mengharapkan ridho Allah SWT. Jika pemberian (hadiah) tersebut bermaksud menghormati atau memuliakan yang diberi disebut hadiah, jika pemberian mengharapkan ridho Allah SWT atau menolong untuk menutupi kesusahannya disebut sedekah. Hibah dan wasiat dilihat dari Hikmatu Al-Tasyri (Filsafat Hukum Islam) adalah untuk memenuhi hasrat berbuat bagi umat islam yang beriman kepada Allah SWT (Al-Baqarah ayat 177). Hibah dan wasiat adalah hak mutlak pemilik harta yang akan dihibahkan atau yang akan diwasiatkan karena hukum Islam mengakui hak bebas pilih (Free Choise) dan menjamin bagi setiap muslim dalam melakukan perbuatan hukum terhadap haknya (Khiyar Fil-kasab). Oleh karena itu apabila (misalnya) ayah atau ibu dari anak akan menghibahkan atau mewasiatkan hartanya, maka tidak seorangpun dapat menghalanginya, karena sedekat-dekatnya hubungan anak dengan ayahnya masih lebih dekat ayahnya itu dengan dirinya sendiri, Syari'at Islam hanya menolong hak anak dengan menentukan jangan sampai hibah dan wasiat melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta atau jangan sampai kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari warisan ayah yang menjadi hak anak. Oleh karena itu pula wasiat selalu didahulukan dari pembagian waris, tingkat fasilitasnya sama dengan membayar zakat atau hutang (jika ada) berkenaan dengan perbuatan hukum dan peristiwa hukum pelaksanaan hibah dan wasiat yang tampak

sepele sehingga karena dianggap sepele cenderung dilakukan tanpa perlu dibuatkan akta sebagai alat bukti. Memang hukum hibah ansich tidak menimbulkan masalah hukum, karena hibah ansich adalah pemberian yang bersifat final yang tidak ada seorangpun yang ikut campur, namun apabila hibah dikaitkan dengan wasiat apabila wasiat behubungan dengan kewarisan, maka akan menimbulkan masalah hukum. Walaupun hibah dan wasiat berdasarkan hukum Islam merupakan salah satu tugas pokok atau wewenang Peradilan Agama (pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006), namun diantara perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama jarang sekali, bahkan hampir tidak ada yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama dibandingkan dengan perkara perceraian dan yang assesoir dengan perkara perceraian, seperti pemeliharaan anak, nafkah anak, harta bersama dan lain-lain serta perkara kewarisan. hal ini mungkin karena hibah dan wasiat dianggap perbuatan baik, maka tidak diperlukan akta sebagai alat bukti atau nilai objek hibah dan wasiat tidak bernilai ekonomi tinggi, atau mungkin sudah dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan kemungkinan lain karena tidak memiliki bukti (walaupun terjadi sengketa), maka tidak diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Dengan demikian sulit mendapatkan putusan yang bernilai yurisprudensi (*stare decicis*) tentang penemuan hukum oleh hakim dibidang wasiat dan hibah ini untuk dianalisis dan kajian ilmiah serta diuji dari metode dan teori hukum Islam.⁴

⁴ A. Hasan, Al-Faraid, Ilmu Pembanguna Waris, Pustaka Progressif, Surabaya, 1996. Hal 56

B. Rukun Hibah

Agar praktek hibah sah dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, hukum Islam telah menetapkan beberapa rukun yang harus dipenuhi :

1. Adanya yang menghibahkan (wahib) yaitu orang yang telah dewasa. Dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa orang yang menghibahkan (wahib) telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari total harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
2. Adanya orang yang menerima hibah (mawhub lah) yang benar-benar nyata wujudnya pada saat dilaksanakannya hibah. Karena itu, menurut Sayid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, menghibahkan harta benda kepada janin adalah tidak sah.
3. Adanya harta benda yang akan dihibahkan yang merupakan milik penuh yang menghibahkan (wahib). Keempat, adanya ijab dan kabul. Ijab artinya pernyataan atau penegasan dari wahib (yang menghibahkan) atas

pemberiannya, seperti mengatakan : “Saya hibahkan benda ini untuk Anda”.

kabul berarti suatu pernyataan atau penegasan dari penerima hibah (mawhub lah) atas kerelaannya menerma hibah. Persyaratan adanya ketegasan ijab dan kabul diperselisihkan di kalangan para ulama fiqh. Sebagian besar ulama Syafi'iyah dan Malikiyah mensyaratkan bagi orang yang mampu berbicara untuk menegaskan ijab dan kabul bagi keabsahan hibah. Menurut mereka, orang yang menghibahkan (wahib) harus secara tegas menyatakan ijab atau pemberiannya. Demikian juga penerima hibah (mawhub lah) harus secara tegas menyatakan secara lisan penerimaannya. Keharusan adanya penegasan hibah itu dengan lisan dimaksudkan agar secara jelas apa yang diberikan itu adalah hibah dan dilaksanakan atas kehendak sendiri secara suka rela. Dengan adanya ketegasan hibah itu, baru berlaku baginya secara mengikat segala hukum hibah. Adanya keharusan ketegasan penerimaan hibah dengan lisan agar secara pasti diketahui kerelaan menerimanya. Berbeda dengan kalangan Hanabilah dan sebagian kalangan Hanafiyah. Menurut mereka, untuk keabsahan suatu hibah tidak mesti adanya ketegasan ijab dan kabul secara lisan. Menurut aliran ini hibah dianggap sah sekalipun dengan tindakan-tindakan yang bisa difahami yang menunjukkan adanya pemberian (hibah).). Alasannya, dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah SAW biasa hadiah menghadahi atau saling memberi tanpa menegaskan ijab dan kabulnya. Praktek seperti ini juga

diikuti oleh para sahabat. Ketika Abdullah bin Umar mengendarai keledai kepunyaan ayahnya, Umar bin Khattab, Rasulullah berkata kepada Umar: “Jual saja keledai ini kepadaku”.⁵

C. Serah Terima Hibah

adanya ijab dan kabul, dalam praktek hibah sering kali diikuti dengan perbuatan serah terima yang terpisah dari ijab dan kabul. Dalam hal ini ada dua aliran yang berkembang di kalangan ulama fiqh. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hibah baru dianggap mengikat dan pasti setelah terjadi serah terima. Artinya, dengan hanya ijab dan kabul tanpa diikuti dengan serah terima, hibah belum dianggap pasti, dalam arti yang menghibahkan (wahib) masih bebas menentukan sikapnya apakah akan meneruskan atau mencabut kembali maksud hibahnya. Pendapat ini dianut oleh Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i. Alasan mereka adalah praktek para sahabat, antara lain Abu Bakar pada suatu waktu menghibahkan suatu benda kepada putrinya, Aisyah r.a, tetapi belum terjadi serah terima antara keduanya. Pada waktu Abu Bakar sedang sakit, ia memanggil Aisyah r.a dan berkata : “Hai putriku, tidak seorangpun yang aku paling sukai hidup berkelapangan sepeninggalku selain dari pada engkau, dan tidak seorangpun yang lebih memilukan aku kecuali engkau hidup dalam kefakiran sepeninggal aku. Dulu aku pernah menghibahkan sesuatu untukmu, maka sisihkanlah benda itu dan terimalah. Karena jika

⁵ A. Hasan, Al-Faraid, Ilmu Pembanguna Waris, Pustaka Progressif, Surabaya, 1996. Hal 80

tidak engkau terima sekarang, jika aku wafat, maka benda itu akan menjadi harta warisan”. Peristiwa tersebut menjadi petunjuk bahwa dengan hanya ijab dan kabul tanpa ditindaklanjuti dengan serah terima, hibah belum dianggap mengikat. Oleh karena itu, Abu Bakar mengingatkan agar dilakukan serah terima sebelum ia wafat. Karena jika tidak, maka harta yang telah pernah diijab-kabulkan itu jika ia wafat tidak dapat dianggap hibah, tetapi menjadi harta waris yang akan dibagi antara seluruh ahli waris.

D. Hibah Tanpa Imbalan

Dalam kitab *Umdat Thalibin* ditegaskan, hibah adalah penyerahan hak milik tanpa imbalan dengan disertai ijab dan kabul baik berupa ucapan maupun berupa syarat. Jika hibah disertai dengan adanya imbalan menurut Sayid Sabiq dalam *Fiqh Al-Sunnah*, maka termasuk penjualan dan berlaku hukum jual beli. Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa mensyaratkan imbalan pada praktek hibah tidak sah karena bertentangan dengan prinsip hibah. Dan oleh karena akadnya adalah akad hibah, maka praktek itu tidak boleh juga dianggap sebagai jual beli atau rukat menukar. Berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambal seperti yang dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* berpendapat, hibah dengan mensyaratkan adanya imbalan adalah sah selama imbalannya itu jelas jenis dan kadarnya. Pendapat ini didukung oleh sebagian ulama kalangan Hanafiyah seperti disebut dalam kitab *Fathul Qodir*. Namun

menurut aliran ini, praktek hibah dengan imbalan sama dengan jual beli dan oleh karena itu yang berlaku adalah hukum jual beli.

E. Pemasukan atas hibah (inberg)

Pemasukan adalah (inberg) pengembalian hibah-hibah yang dilakukan pewaris selama hidup kedalam harta peninggalan si pewari. Inberg dilakukan pada saat pembagian dan pemisahan pada saat harta peninggalan. Pasal 1079 KUHPdata antara lain memuat ketentuan: setelah diaturnya perihal pemasukan dan tentang apa yang oleh harta peninggalan berdasarkan apapun juga harus dibayar kepada seorang atau beberapa orang dari para ahli waris, maka di tetapkan sisanya harta peninggalan dan pembagian masing-masing pancang. Semua hibah semua hibah-hibah yang diberikan kepada ahli waris seakan-akan merupakan persekot, dengan mengingat pasal 1089 KUHPdata.

Pasal 1089KUHPdata mengatur:

1. Para orangtua tidak usah memasukkan pemberian-pemberian yang dilakukan kepada anak mereka oleh kakek neneknya anak ini;
2. Begitu pula tak usahlah seorang anak, yang berdasarkan kedudukannya sendiri memperoleh warisan kakek neneknya, memasukkan pemberian yang oleh kakek neneknya ini tlah dilakukan kepada orangtuanya.
3. Sebaliknya, seorang anak yang memperoleh warisan tersebut hanya karena pergantian, diwajibkan memasukkan segala pemberian yang telah dilakukan kepada orangtuanya, sekalipun kiranya warisan orang tuanya sendiri telah ditolak.
4. Namun demikian, anak tersebut dalam hal penolakan seperti itu, tidaklah bertanggungjawab terhadap para kawannya mewaris dalam warisan kakek nenek tersebut mengenai hutang-hutang orang tuanya.

Yang harus Inberg, Pasal 1086 mengatur mengenai siapa saja yang harus inberg, yaitu:

Ayat 1

- para ahli waris dalam garis lurus kebawah, baik sah maupun anak luar kawin, termasuk juga penggantinya (ps 841).
- baik menerima warisan secara murni maupun terbatas.
- mereka yang menerima sebanyak LP atau lebih, kecuali jika dengan tegas dibebaskan untuk inberg dalam suatu akta wasiat.

Ayat 2

- Para ahli waris lainnya, baik ab instenstato/testamentair, namun hanya mereka yang diwajibkan dengan tegas untuk inberg.

Yang menolak tidak Inberg, Pasal 1087:

” seorang waris yang menolak warisannya tidaklah diwajibkan memasukkan apaapa yang telah di hibahkan selainnya untuk menambah bagian yang demikian menyebabkan bagian mutlak para kawannya pewaris telah dikurangi.”

Hibah kepada anak cucu

Pasal 1089

1. Para orang tua tidak usah memasukkan pemberian-pemberian yang telah dilakukan pada anak mereka oleh kakek neneknya anak ini.
2. Begitu pula tak usahla seorang anak, berdasarkan kedudukannya sendiri memperoleh warisan kakek neneknya, memasukkan pemberian yang oleh kakek neneknya ini telah dilakukan kepada orang tuanya.⁶

F. Surat Wasiat

Menurut pasal 875 KUHPerdato yakni :

“Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang membuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendaki terjadi setelah

⁶ Efendi Perangin,Hukum Waris, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. Ke Tiga, Hal. 146.

ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat di cabut kembali.”

G. Perjanjian

Menurut pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata tentang perjanjian yaitu :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Dalam hal ini mengenai hibah. Adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Kecakapan untuk memberi dan menerima hibah Untuk menghibahkan, seorang, selainnya bahwa ia harus sehat pikiran, harus sudah dewasa. Diadakan pengecualian dalam halnya seorang yang belum mencapai usia genap 21 tahun, menikah dan pada kesempatan itu memberikan sesuatu dalam suatu perjanjian kawin (pasal 1677 KUHPerdata), yang berbunyi:

“Hibah hanyalah dapat mengenai benda – benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda – benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekadar mengenai itu hibahnya batal”.

Orang yang belum mencapai usia genap 21 tahun itu diperkenankan membuat perjanjian perkawinan asal ia dibantu oleh orangtuanya atau orang yang harus memberikan ijin kepadanya untuk melangsungkan perkawinan. Dengan istilah “dibantu” dimaksudkan bahwa orang yang

belum dewasa itu membuat sendiri perjanjiannya (sebagai pihak) namun ia didampingi oleh orang tuanya itu. Agar dapat dikatakan tentang sesuatu “pemberian”, perbuatan itu harus bertujuan memberikan suatu hadiah belaka jadi tidak boleh ada suatu keharusan atau perikatan meskipun hanya berupa *natuurlijke verbinten* (janji dengan sendirinya) saja. Perkataan “pemberian” dalam pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dipakai dalam arti kata yang sempit, karena hanya perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan disitu dinamakan “pemberian”, misalnya syarat dengan “cuma-cuma” yaitu tanpa pembayaran. Di sini dapat dikatakan tentang suatu “*formele schenking*” (hanya untuk memenuhi formalitas pemberian/hibah).

H. Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) menjelaskan tentang pengertian anak dan macam-macam, yaitu:

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun macam-macam anak dapat dibedakan menjadi:

- a. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun social.
- b. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan

perkembangannya secara wajar.

- c. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi/atau bakat istimewa.
- d. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

I. Harta peninggalan

Harta peninggalan adalah suatu harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.

Harta peninggalan terdiri dari:

- J. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak, dan utang piutang.
- K. Hak-hak kebendaan. Yang termasuk dalam kategori kebendaan ini seperti sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan, dan lain-lain.
- L. Hak-hak yang bukan kebendaan. Yang termasuk dalam kategori hak-hak yang bukan kebendaan ini seperti hak khair, hak syuf'ah (hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota syarikat atau hak-hak tetangga atas tanah perkarangan dan lain-lain)

1.6

Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.⁷

Pendekatan yang peneliti lakukan ini berdasarkan aturan-aturan dan teori-teori yang berkaitan dengan hibah waris terhadap anak angkat berdasarkan wasiat melalui hibah yang diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) telah diatur tentang hibah ini, yaitu pasal 210 – 214.

b. Fokus penelitian

Yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah akibat hukum pemberian hibah yang tidak prosedural.

c. Sumber Bahan Hukum.

Dalam penulisan ilmu hukum normatif, sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu

⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, h 87

hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.⁸ Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Data primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini, yaitu :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- 3) Kompilasi Hukum Islam

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer, hal ini bisa berupa:

- 1) Buku-buku ilmu hukum;
- 2) Jurnal ilmu hukum;
- 3) Laporan penelitian ilmu hukum;
- 4) Internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

⁸Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, 2008, h 86

d. Metode Pengumpulan Data.

Dalam pengkajian ilmu hukum, metode atau cara untuk mengumpulkan data berbeda dengan cara pengumpulan data pada disiplin ilmu lain, perbedaan ini muncul karena apa yang dimaksud dengan data dalam ilmu hukum berbeda dengan makna data pada penelitian ilmu hukum lain. Data yang dimaksud dalam penelitian ilmu hukum Normatif adalah apa yang ditemukan sebagai isu atau permasalahan hukum dalam struktur dan materi hukum positif yang diperoleh dari kegiatan mempelajari bahan-bahan hukum terkait.⁹

e. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan cara metode pengumpulan data dengan cara mempelajari beberapa kepustakaan yang relevan dengan penelitian dan bertujuan untuk memperoleh data pendukung guna memperkuat argumentasi. Adapun bahan pustaka yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini terutama sekali adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata

f. Analisis Data.

Analisis hasil penulisan berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah. Analisis data

⁹Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju,

yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan aspek yang lain dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh. Disamping memperoleh gambaran secara utuh, ditetapkan langkah selanjutnya dengan memperhatikan dokumen khusus yang menarik untuk diteliti yang kasus tindak pidana korupsi. Dengan demikian penelitian menjadi lebih fokus dan tertuju pada masalah yang lebih spesifik.¹⁰

g. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, maka kerangka dibagikan beberapa bab yang terdiri atas sub-sub:

Bab I pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, meliputi latar belakang perumusan masalah, tujuan

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, h 174

penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini serta sistematika penulisan ini. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada pembaca agar dapat mengetahui secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Bab II, menguraikan prosedur pemberian hibah menurut kompilasi hukum Islam. Pada bab ini terdiri dari tiga sub, pertama mengenai Unsur-unsur Penyelenggaraan Hibah Menurut Hukum Islam serta Rukun Dan Syarat Hibah Wasiat.

Bab III, menguraikan tentang Akibat Hukum Bagi Penerima Hibah Yang Tidak Prosedural. Dalam bab ini terdiri dari empat sub bab yaitu, pertama Analisis Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Terhadap Anaka Angkatnya. serta Akibat Hukum Bagi Penerima Hibah Yang Tidak Prosedural

Bab IV, penutup. Merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dari bab-bab sebelumnya dan juga saran-saran dari permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang di angkat dalam penulisan skripsi ini.

